

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Dalam usaha mengejar kepentingan nasionalnya banyak negara tidak lagi hanya menekankan pada kekuatan militer dan ekonomi saja melainkan juga melalui budaya. Joseph, S. Nye, Jr (2004) menyatakan: 'Sumber kekuatan sebuah negara pasca perang dingin tidak hanya bergantung pada kekuatan militer saja melainkan pada sumber lain seperti budaya dan kebiasaan yang disebut dengan soft power.'

Istilah *Soft power* mulai dikenal sejak 1980an. pengertian *soft power* mengacu kepada kemampuan sebuah negara untuk mengejar kepentingan nasional melalui cara menarik sebagai ganti cara kekerasan (*hard power*) seperti perang atau intervensi militer (Djelantik 2008, hlm.209-210). *Soft power* biasanya digunakan untuk mempengaruhi sebuah negara tidak hanya pada pemerintahanya tetapi juga masyarakat negara tersebut sehingga cara yang biasa digunakan dalam menyebar soft power ini adalah melalui media budaya.

Setelah kekalahan Jepang di perang dunia ke II, Jepang bangkit sebagai negara dengan ekonomi yang maju. Kenaikan ekonomi Jepang tidak lepas dari doktrin yang dikeluarkan Perdana Menteri Yoshida Shigeru. *Yoshida Doctrin* atau lebih dikenal dengan *checkboxbook diplomacy* menitik beratkan pada perkembangan ekonomi karena kondisi perekonomian Jepang yang hancur pada paska perang dunia II, salah satu poin dari doktrin ini ialah pemulihan ekonomi. Pemulihan ekonomi Jepang membuat negaranya muncul sebagai kekuatan ekonomi baru di kawasan Asia. Jepang merupakan negara yang tidak mempunyai hasil alam dan energi sendiri serta untuk Jepang juga memerlukan pasar baru bagi produk-produknya untuk itu Jepang memerlukan kerjasama dengan negara lain, negara-negara yang dituju Jepang adalah negara-negara di Asia Tenggara. salah satunya dengan cara menjalin kerjasama ekonomi yang dilakukan oleh negara Jepang dengan Indonesia, selain menjalin hubungan ekonomi, Jepang juga memberikan bantuan ekonomi. Bantuan ekonomi yang diberikan oleh Jepang merupakan upaya Jepang memberikan kompensasi bagi negara bekas jajahannya, Jepang juga

menyiapkan Asia Tenggara sebagai salah satu pasar bagi ekspor barang-barang yang diproduksinya. Bantuan yang diberikan kepada negara-negara Asia Tenggara dengan sendirinya disesuaikan dengan kebutuhan strategi ekspornya (Ezra F.vogel, 1988. Hlm 98). Diantara itu, bantuan yang diberikan oleh pemerintah sebagai pelaku utama disebut, "Bantuan Pembangunan Pemerintah (*Official Development Assistance / ODA*)". Bantuan ODA Jepang terhadap Indonesia telah berlangsung sejak tahun 1960, yaitu pada saat dikeluarkannya *checkbook diplomacy* oleh Perdana Menteri Yoshida (Kedutaan Besar Jepang, hlm 1).

Tetapi, bantuan ekonomi yang diterima negara-negara ASEAN tidak berarti tanpa kekurangan. Dalam persepsi publik Asia Tenggara yang kritis, terutama di kalangan mahasiswa, Jepang dianggap sebagai negara penjajah yang hanya mengeksploitasi kekayaan alam negara-negara ASEAN namun gagal memberikan ganti yang seimbang. Mereka bahkan menuduh para pengusaha Jepang melakukan lobi – lobi kotor dengan para pejabat lokal sehingga dapat memperoleh proyek apa pun yang mereka inginkan (Vogel 1988, hlm.65). Bahkan ketika PM Jepang Tanaka Kakuei melakukan kunjungan ke Indonesia pada tahun 1974, terjadi demo besar – besaran di Indonesia pada tanggal 15 Januari 1974 atau yang lebih terkenal dengan peristiwa Malari. Pada saat itu mahasiswa se-Indonesia melakukan aksi bersama di Universitas Trisakti Jakarta. Seorang aktivis bernama Hariman Siregar memimpin demonstrasi 400-an mahasiswa untuk menolak kedatangan PM Jepang ke Indonesia. Jakarta dipenuhi asap hitam dan bara api berasal dari pembakaran mobil-mobil buatan Jepang, yang dibakar mahasiswa ditambah ribuan masyarakat luas sebagai simbol perlawanan atas hegemoni Jepang terhadap perekonomian Indonesia. Peristiwa tersebut dilatar belakangi karena Jepang saat itu dianggap memeras ekonomi Indonesia. Sejak Indonesia dan Jepang melakukan kerjasama ekonomi dan perdagangan dengan menandatangani *treaty on emity relation and commerce* tahun 1961 Jepang telah mengambil lebih dari 53% ekspor (71% diantaranya berupa minyak) dan memasok 29% impor Indonesia. Selain itu investasi Jepang dinilai membunuh pengusaha-pengusaha kecil pribumi (Barata 2010, hlm.1). Hal ini disebabkan pada tahun 1960-1980an Jepang merupakan Investor terbesar di sektor-sektor Non-energi dan menguasai 41% Investasi modal asing di Indonesia.

Adanya Peristiwa Anti-Jepang membuat Jepang terus melakukan perbaikan hubungan kepada negara yang mengkritik Jepang, salah satunya dengan melakukan diplomasi publik melalui pendekatan budaya. Perdana Menteri Jepang saat itu, PM Takeo Fukuda, membuat sebuah doktrin yang lebih dikenal dengan istilah Doktrin Fukuda. Esensi dari Doktrin Fukuda tersebut adalah :

- a. Jepang tidak akan pernah menjadi negara adidaya militer.
- b. Jepang akan menjalin hubungan dengan rasa saling pengertian dan rasa saling percaya terhadap negara–negara di Asia Tenggara.
- c. Jepang akan bekerjasama secara positif dengan seluruh anggota ASEAN sebagai mitra sejajar.

Doktrin Fukuda ini mengubah cara diplomasi Jepang dengan menggunakan pendekatan hubungan kepada publik internasional. Cara diplomasi baru Jepang dilakukan terutama melalui berbagai produk budaya Jepang, seperti menyebarkan nilai, keunikan budaya Jepang dengan maksud bahwa Jepang ingin melibatkan keikutsertaan publik dalam kebijakan diplomasinya.

Sejalan dengan dikeluarkannya doktrin Fukuda, Diplomasi publik Jepang di Indonesia melalui budaya diawali dengan pendirian Japan Foundation di Jakarta pada tahun 1979 yang bertujuan untuk mengubah image negatif Jepang dimata masyarakat Indonesia melalui pertukaran kebudayaan Jepang dengan Indonesia. Tujuan yang ingin dicapai Jepang dalam diplomasi publiknya adalah citra positif Jepang sebagai negara yang dapat dipercaya oleh internasional, negara yang indah dan bersahabat serta negara yang damai serta terbuka bagi publik (Nakamura 2015, hlm.7-8). Diplomasi publik di Indonesia melalui Japan Foundation dilakukan secara bertahap, hal ini untuk melihat respon masyarakat Indonesia terhadap Jepang setelah peristiwa Malari hingga pendirian sepenuhnya dari Japan Foundation.(Yanti 2012, hlm.7-8). Bentuk-bentuk diplomasi publik Jepang melalui Japan Foundation dilakukan dalam beberapa kegiatan pertukaran budaya, pendidikan bahasa serta Pertukaran. (Yanti 2012, hlm.60). Selain budaya tradisional, sesuai dengan perkembangan globalisasi, Diplomasi Jepang melalui budaya di Indonesia tidak lagi hanya terbatas hanya pada budaya tradisional, Budaya Pop Jepang kemudian menjadi strategi baru Jepang dalam diplomasi

publiknya. hal ini sejalan dengan isi diplomatic bluebooknya yang dikeluarkan pada tahun 2004. Diplomasi publik menggunakan budaya pop ini kemudian dikenal sebagai program “Cool Japan” yang berfokus pada pengenalan budaya pop Jepang melalui anime dan manga (Nakamura 2015, hlm.1-2).

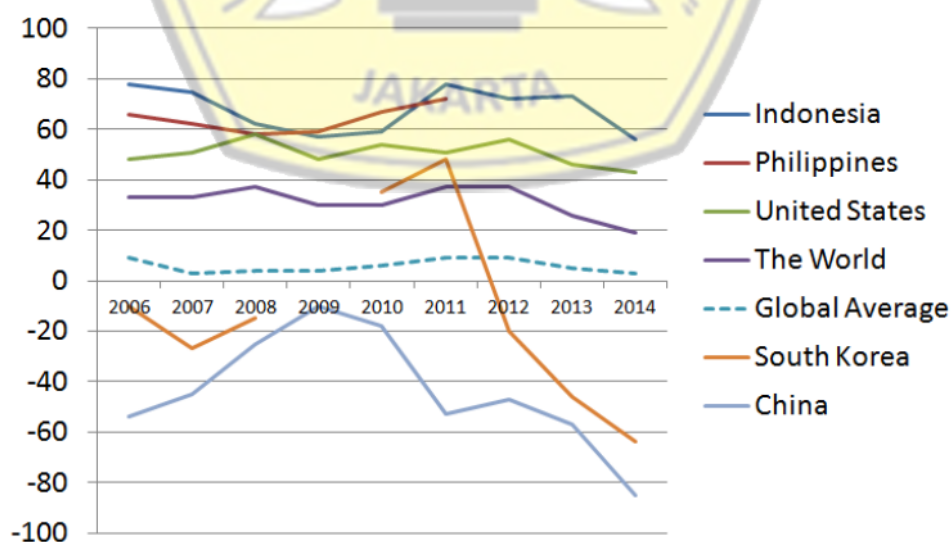
Dampak dari diplomasi publik yang telah dilakukan oleh Jepang sangat membantu mengubah opini publik internasional tentang citra Jepang yang lebih baik terutama di 6 negara ASEAN. hal ini dapat terlihat dari survey yang dilakukan Jepang melalui Kementerian luar negeri Jepang (MOFA) pada tahun 2008, Hasil survey memperlihatkan bahwa 93 persen dari para responden negara-negara di Asia tenggara memiliki pandangan maupun respon yang positif terhadap Jepang (Nakamura 2015, hlm.9-10). Di Indonesia sendiri, hasil diplomasi publik melalui kebudayaan ini mendapat respon yang positif dari masyarakat. Tidak hanya berhasil meredakan penolakan terhadap Jepang, masyarakat Indonesia mulai menyukai budaya Jepang hal ini terlihat dari banyaknya festival Jepang Indonesia maupun ketertarikan masyarakat Indonesia dalam mempelajari bahasa Jepang.

Respon positif Indonesia terlihat dari hasil polling opini terhadap Jepang, dari tahun 2008 hingga 2014 citra Jepang di Indonesia sebagai negara yang dapat dipercaya naik dari 44% menjadi 71%, kemudian opini Jepang sebagai negara yang “cool” juga naik dari 34% menjadi 40% kemudian peningkatan minat Indonesia terhadap budaya pop Jepang meningkat pesat dari 8% menjadi 52% pada 2014 (MOFA 2014, hlm.1).

Meski diplomasi publik yang dilakukan Jepang melalui budaya dapat mengubah pandangan Indonesia terhadap negaranya, diplomasi publik Jepang kembali menemui tantangan baru. Bencana gempa di Timur Jepang yang terjadi pada 2011 menyebabkan bocornya reaktor memunculkan persepsi negatif bagi citra Jepang di mata Internasional termasuk Indonesia. Meskipun banyak mendapat respon simpati terhadap Jepang atas bencana yang menimpa bagian timur Jepang ini, manajemen informasi Jepang yang kurang baik menimbulkan persepsi negatif dari dalam maupun luar negeri. Komunikasi pemerintah dikritik keras akibat hal tersebut, meskipun Jepang berusaha keras untuk meredakan isu terkait kebocoran nuklir dengan menyebarluaskan berbagai pesan langsung ke politisi penting, seperti PM Naoto Kan, dan dengan memberikan informasi dalam

bahasa Inggris untuk media internasional. Namun tetap saja, bencana nuklir Jepang menyebabkan kekhawatiran bagi orang-orang yang akan untuk melakukan perjalanan ke Jepang sehingga menyebabkan wisatawan Jepang menurun pada bulan maret hingga agustus 2011. Manajemen informasi Jepang yang buruk menciptakan ketakutan berlebih pada orang-orang untuk melakukan kontak dengan produk-produk Jepang yang berpotensi terkontaminasi. Selain itu bencana juga berdampak pada citra Jepang sebagai negara berteknologi tinggi dimata masyarakat internasional (Nakamura 2015, hlm.15-16).

Tidak hanya itu, meski hasil polling opini pada 2008 hingga 2014 menunjukkan banyak respon positif Indonesia namun, citra Jepang sebagai negara yang damai di mata Indonesia menurun dari 50% menjadi 34 % begitu pula dengan citra Jepang sebagai negara demokrasi yang awalnya 28% menjadi 12%. (MOFA, hlm.1). Penurunan ini disebabkan oleh adanya perubahan kebijakan luar negeri oleh kabinet Abe yang menciptakan banyak konflik di asia timur. Konflik serta persaingan yang semakin meningkat antara negara asia timur membuat pengaruh dari *soft power* Jepang menurun (Seungik 2015, hlm. 4-5). Hal ini juga sejalan dengan menurunnya citra positif Jepang di Indonesia serta negara di Asia timur dan Asia Tenggara yang terlihat dari gambar dibawah



Sumber: BBC World Service

Grafik1 Pandangan Negara Lain Terhadap Figur Positif Jepang

Berdasarkan gambaran diatas meski citra positif Jepang sebelum 2008 terjadi penurunan namun satu tahun setelahnya hingga 2011 citra Jepang di Indonesia mencapai titik tertinggi namun setelah 2011 hingga 2014 citra Jepang di Indonesia kembali mengalami penurunan. Disamping penurunan figur Jepang, salah satu alasan Jepang perlu meningkatkan diplomasi publiknya adalah karena adanya kebangkitan Cina dikawasan Asia tenggara termasuk di Indonesia.

Menurut Jepang Departemen Luar Negeri, diplomasi publik Jepang kegiatan dikategorikan kedalam enam kategori yang meliputi (1) public relations di luar negeri, (2) berita-berita dari Jepang, (3) pertukaran budaya, (4) pertukaran orang-ke-orang, (5) kerjasama dengan organisasi-organisasi budaya internasional dan (6) bantuan hibah budaya. Melayani sebagai alat penting dari diplomasi publik Jepang, berkontribusi terhadap peningkatan soft power-nya, pertama empat kategori yang merupakan alat penting dari diplomasi publik Jepang yaitu: (1) *Public Relation Aboard*, (2) *Peace-Keeping Efforts*, (3) *Cultural Exchange* (4) *People to People Exchange*. Diplomasi kebudayaan dapat dikatakan menjadi yang pertama dan elemen yang paling penting dari diplomasi publik Jepang. (Duong 2013, hlm. 27-29)

I.2 Rumusan Masalah

Citra positif Jepang di mata Indonesia merupakan bagian yang penting untuk mendukung hubungan serta kerjasama antara kedua negara, terutama setelah terjadinya peristiwa penolakan Jepang di Indonesia tentunya Jepang harus tetap mempertahankan citranya sebagai negara “damai” dan “demokratis”. Presepsi negatif akibat kebocoran nuklir, kebijakan kabinet Abe yang agresif dalam masalah persaingan Sino-Jepang serta kebangkitan Cina dikawasan membuat Jepang harus kembali meningkatkan citra sebagai negara yang “baik” dengan diplomasi publiknya. Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah yang diambil oleh penulis adalah :

Bagaimana Diplomasi Publik yang dilakukan Jepang di Indonesia melalui Program *Cultural Exchange* periode 2011-2015?

I.3 Tujuan Penelitian

- a. Menjelaskan latar belakang penurunan citra positif Jepang di Indonesia
- b. Menganalisis diplomasi publik yang dilakukan Jepang di Indonesia melalui *cultural exchange* periode 2011-2015

I.4 Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Praktis: Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai latar belakang penurunan citra Jepang di Indonesia serta bentuk diplomasi publik Jepang di Indonesia melalui *cultural exchange*
- b. Manfaat Akademis: Diharapkan penelitian ini akan memberikan informasi dan data yang lebih jelas bagi studi hubungan internasional tentang diplomasi publik, serta bentuk dan program-program *cultural exchange* *cultural* Jepang di Indonesia

I.5 Tinjauan Pustaka

Dalam menulis penelitian ini penulis menggunakan beberapa tinjauan pustaka yang terkait dengan penelitian ini pertama yaitu skripsi dari **Eki Febriani Kamsin** (IISIP, 2012) yang berjudul ***Diplomasi publik Jepang dalam rangka meningkatkan Citra Jepang di Asia Tenggara***. Dalam Skripsi ini Eki Febriani menguraikan upaya-upaya diplomasi publik yang dilakukan Jepang pada tahun 2005 hingga 2010 dalam rangka peningkatan citra Jepang dimasyarakat negara Asia Tenggara khususnya dalam bidang sosial budaya. perilaku dan budaya Jepang dapat dilihat dari perjalanan sejarah Jepang dalam pelaksanaan di percaturan politik dalam maupun dalam melaksanakan hubungan internasional hubungan internasionalnya. Hambatan lain bagi Jepang untuk berperan aktif didalam lingkungan internasional adalah faktor hubungannya dengan beberapa negara tetangga dekatnya. Kemudian Jepang melakukan pendekatan budaya yang dikenal dengan nama doktrin Fukuda (1977). Hubungan Jepang di Asia tenggara sangat dipenuhi emosi akibat kependudukan Jepang selama perang dunia II. Tahun 1977 merupakan tahun penentu bagi Jepang dalam upaya memperbaiki hubungannya dengan negara-negara di ASEAN. Pada tahun 1977, PM Jepang

Fukuda Takeo meluncurkan kebijakan luar negeri yang berbasis pada kerjasama budaya dan ekonomi. dalam pidatonya, Fukuda mengatakan bahwa Jepang ingin membangun hubungan dengan negara-negara di Asia tenggara dengan berdasarkan konsep “heart to heart” yang mentargetkan kebijakan luar negeri Jepang di Asia tenggara adalah masyarakat melalui diplomasi publik. Kemudian pada tahun 1989 Jepang menunjukkan komitmennya pada kerjasama budaya ketika PM Takeshita dalam kebijakan luar negerinya menyebutkan konsep yang disebut Internatinal cooperative Initiative, yang mendasar pada tiga pilar yaitu penguatan kerjasama untuk perdamaian, perluasan ODA, serta penguatan budaya internasional. Tahun 1997 PM hashimoto menekankan pentingnya budaya dalam hubungan Jepang dengan negara lain. Penurunan figur Jepang dan kebangkitan cina membuat Jepang berpikir meningkatkan diplomasi publiknya dalam bidang budaya. diplomasi publik Jepang berangkat dari perkembangan globalisasi, peningkatan kekuatan cina serta kompetisi antar negara serta kompetisi antara negara. Negara Jepang sendiri memiliki beberapa cara dalam menjalankan diplomasi publiknya pertama yaitu melalui industri anime dan manga sebagai budaya pop Jepang yang merupakan Alat diplomasi publik Jepang yang utama. Penyebaran budaya pop Jepang seperti manga, anime, fashion dan film, permainan, makanan, karakter merupakan sebuah produk yang bersifat ekonmi namun berdasarkan pada produk budaya. kemudian program pertukaran yang terdiri atas pertukaran budaya, people to people exchange, culture grant assistance, japan exchange and teaching programme (JET). Dalam penelitaian ini juga menguraikan bahwa diplomasi publik memerlukan aktor untuk mendukung jalannya diplomasi publik Jepang ini yaitu melalui pemerintah yaitu melalui kementerian luar negeri Jepang (MOFA) , Japan Foundation serta JICA. Diplomasi publik Jepang di Asia Tenggara ini berpengaruh cukup bensar pada hubungan antara Jepang serta negara-negara Asia Tenggara. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya masyarakat di negera-negara ASEAN yang tertarik dengan budaya Jepang. Di dalam Penelitian ini cukup menjelaskan secara dalam mengenai diplomasi publik Jepang serta program-program dalam diplomasi publik, namun penilitian ini tidak menjelaskan bentuk diplomasi publik yang dilakukan Jepang disetiap negera serta. Disinilah penulis akan menguraikan bentuk diplomasi publik

melalui kegiatan pertukaran budaya Jepang di Indonesia serta menguraikan hambatan serta tantangan yang dihadapi Jepang dalam melaksanakan diplomasi publiknya di Indonesia. Penelitian ini juga digunakan penulis sebagai referensi penulis dalam melakukan penelitian.

Tinjauan pustaka berikutnya adalah jurnal yang ditulis oleh **Seungik Han (Korea University, 2015)** yang berjudul *Indonesia, Japanophile: Japanese soft power in Indonesia*. Jurnal ini menguraikan mengapa Indonesia sangat mempercayai Jepang. Disaat negara-negara di asia timur menilai negatif negara Jepang, negara-negara di ASEAN terutama Indonesia sangat memandang positif pengaruh Jepang. Alasan besarnya pengaruh serta pandangan positif Indonesia terhadap Jepang adalah karena diplomasi kebudayaan. Dalam polling yang diterbitkan MOFA menunjukkan kepercayaan atas Jepang, ketertarikan akan budaya Jepang, serta pandangan Jepang sebagai negara yang “cool” meningkat namun tidak pada pandangan Jepang sebagai negara damai serta demokratik cenderung menurun. Hal ini disebabkan oleh kebijakan kabinet abe yang cenderung menimbulkan ketegangan di Asia timur. Jurnal ini memperlihatkan bahwa diplomasi melalui kebudayaan Jepang telah berhasil menarik perhatian masyarakat terhadap kebudayaan Jepang namun ketika masuk kedalam perluasan konsep dari budaya yang memasuki nilai dari damai serta demokrasi kepopuleran Jepang di Indonesia telah menurun. Jurnal ini tidak membahas secara lengkap bentuk-bentuk diplomasi publik melalui kebudayaan yang dilakukan oleh Jepang di Indonesia serta tidak secara dalam menguraikan penurunan citra Jepang yang disebabkan oleh kebijakan kabinet abe serta dampaknya terhadap persaingan antara sino-Jepang di Indonesia oleh karena itu peneliti akan menguraikan bentuk diplomasi kebudayaan Jepang serta alasan penurunan citra serta pengaruh Jepang di Indonesia. Jurnal ini digunakan penulis sebagai latar belakang masalah serta data tambahan bagi pembahasan yang dibahas penulis.

Tinjauan pustaka berikutnya adalah jurnal **Toshiya Nakamura (Nagoya University, 2015)** yang berjudul *Japan's New Public Diplomacy: Coolness in Foreign Policy Objectives*. Penelitian ini menjelaskan penggunaan budaya sebagai bagian dari penyebaran soft power Jepang. antusiasme Jepang menggunakan soft power budayanya telah digunakan selama beberapa waktu. contohnya seperti

majalah bulanan *gaiko foramu (diplomatic forum)* yang diterbitkan oleh kementerian luar negeri Jepang yang berisikan artikel tentang pop culture serta diplomasi kebudayaan di beberapa isu. Kemudian Japan Foundation yang bekerja secara dekat kementerian luar negeri Jepang menyelenggarakan survei comprehensive mengenai bermacam program serta organisasi pertukaran budaya di negara lain dan pada tahun 2004 kementerian luar negeri Jepang berubah seiring pembentukan departemen diplomasi publik, bertujuan untuk meningkatkan citra internasional Jepang dengan menggunakan kebudayaan populer Jepang sebagai sumber dari soft power. Toshiya juga menjelaskan apa yang coba Jepang raih dari diplomasi publiknya yang baru. pemimpin politik Jepang secara tidak langsung ingin memperlihatkan image serta ide yang mereka harap dapat i mereka perlihatkan. "Jepang sebagai negara yang Indah", "negara yang menghargai budaya, tradisi, sejarah serta alam", "negara yang dapat dipercaya, dihormati serta dicintai oleh dunia dan menggambarkan kepemimpinan" yang berarti bahwa Jepang ingin memperlihatkan sebuah image dari Jepang yang damai sedang nilai kebudayaan Jepang yang akan berguna bagi negara lainnya. Bencana gempa di Timur Jepang yang terjadi pada 2011 menyebabkan bocornya reaktor memunculkan persepsi negatif bagi citra Jepang di mata Internasional termasuk Indonesia. Meskipun banyak mendapat respon simpati terhadap Jepang atas bencana yang menimpa bagian timur Jepang ini, manajemen informasi Jepang yang kurang baik menimbulkan persepsi negatif dari dalam maupun luar negeri. Komunikasi pemerintah dikritik keras akibat hal tersebut, meskipun Jepang berusaha keras untuk meredam isu terkait kebocoran nuklir dengan menyebarluaskan berbagai pesan langsung ke politisi penting, seperti Perdana Menteri Naoto Kan, dan dengan memberikan informasi dalam bahasa Inggris untuk media internasional. Namun tetap saja, bencana nuklir Jepang menyebabkan kekhawatiran bagi orang-orang yang akan untuk melakukan perjalanan ke Jepang sehingga menyebabkan wisatawan Jepang menurun pada bulan maret hingga agustus 2011, selain itu manajemen informasi Jepang yang buruk menciptakan ketakutan berlebih pada orang-orang untuk melakukan kontak dengan produk-produk Jepang yang berpotensi terkontaminasi. Selain itu bencana juga berdampak pada citra Jepang sebagai negara berteknologi tinggi dimata

masyarakat internasional. Meski jurnal ini menguraikan tentang perubahan dalam diplomasi publik Jepang tantangan yang dihadapi Jepang pasca bencana yang dihadapinya, namun jurnal ini tidak membahas upaya dilakukan oleh pemerintah Jepang agar persepsi negatif yang terbentuk akibat “krisis” nuklir bisa berubah sehingga publik internasional kembali melihat sebagai negara dengan image yang positif. Disinilah penulis membahas upaya melalui budaya yang dilakukan pemerintah Jepang untuk mengembalikan image positif Jepang.

I.6 Kerangka Pemikiran

a. Diplomasi Publik

Diplomasi merupakan bagian pengelolaan dari hubungan internasional melalui negosiasi. Diplomasi sebagai sebuah instrumen dari kebijakan luar negeri dirancang untuk mencapai sebuah kesepakatan maupaun tujuan di dalam konflik-konflik kepentingan negara.

Sir Ernest Satow (1992) mendefinisikan bahwa diplomasi merupakan aplikasi intelijen dan taktik untuk menjalankan hubungan resmi antara pemerintah yang berdaulat, yang kadang kala diperluas dengan hubungan negara-negara yang jajahannya dan sejalan dengan Satow, Barston (1997) mendefinisikan diplomasi sebagai manajemen hubungan antar negara atau hubungan antar negara dengan aktor-aktor hubungan internasional. Negara, melalui perwakilan resmi dan aktor-aktor lain berusaha untuk menyampaikan, mengkoordinasikan dan mengamankan kepentingan nasional khusus atau yang lebih luas, yang dilakukan melalui korespondensi, pembicaraan tidak resmi, saling menyampaikan cara pandang, loby, kunjungan dan aktivitas-aktivitas lainnya yang terkait (Djelantik 2012, hlm.4) .

Di masa modern saat ini serta perubahan-perubahan dalam dunia internasional membuat Diplomasi tidak lagi hanya sebatas pada diplomasi tradisional (*first track diplomacy*). Seiring bertambahnya kompleksitas tatanan internasional konsep “*second track diplomacy*” dibangun atas respon perkembangan dunia internasional. *Second track diplomacy* atau biasa disebut citizen diplomacy adalah pelibatan aktor

mulai dari profesional dan individu yang berpotensi berpengaruh dari masyarakat tanpa status perwakilan. Pada dasarnya *second track diplomacy* ini melengkapai *first track diplomacy* yang membuka peluang dari komunikasi diplomatik, pemahaman lintas budaya dan upaya bersama untuk menjelajahi bagaimana kebutuhan para pihak dapat diatasi ketika dialog resmi dibatasi.

Diplomasi publik merupakan salah satu bagian dari *second track diplomacy*, diplomasi publik telah berkembang pesat terutama dalam dua dekade terakhir. Perkembangan ini dipicu oleh kenyataan bahwa pemerintah dalam jalur *first track diplomacy* dianggap telah gagal mengatasi konflik antar negara. (Fulton 1993 dikutip Djelantik 2012, hlm. 189). Diplomasi publik bukan berarti menggantikan diplomasi resmi yang telah ada akan tetapi melengkapi upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam diplomasi tradisional. Idealnya, diplomasi publik harus membuka jalan bagi negosiasi yang dilakukan antar pemerintah, memberi masukan melalui informasi-informasi penting, dan memberikan cara pandang yang berbeda terhadap suatu masalah. Untuk itu, diperlukan kerjasama aktor negara dan non-negara yang ditujukan untuk meningkatkan nilai tawar pemerintah. Aktor non-negara ini misalnya dapat berinteraksi dengan rekanan mereka dalam mempengaruhi, memberikan masukan, dan menerapkan kebijakan luar negeri. Penerapan diplomasi publik tidak terlepas dari pengkomunikasian kebijakan luar negeri terhadap publik mancanegara. Ciri utama dalam diplomasi publik adalah melibatkan semua stakeholder dalam prosesnya. Stakeholder di sini tidak hanya Departemen Luar Negeri, tetapi juga lintas departemen dalam pemerintah, swasta, NGO, media, dan individu.

Diplomasi publik bertujuan menumbuhkan opini masyarakat yang positif di negara lain melalui interaksi dengan kelompok-kelompok kepentingan. Oleh karena itu, diplomasi publik mensyaratkan kemampuan komunikasi antar budaya karena terkait dengan dengan perubahnya sikap masyarakat, saling pengertian dalam melihat persoalan-persoalan politik luar negeri. Di era informasi, pendapat secara

efektif dapat mempengaruhi tindakan pemerintah (Djenlantik 2012, hlm. 191)

Istilah diplomasi publik memang diperkenalkan oleh AS. Tetapi dalam bentuk yang tidak jauh berbeda, perancis telah mempraktekannya sejak abad ke-19 dengan nama “diplomasi kebudayaan” diplomasi kebudayaan ini memiliki makna yang kurang lebih sama dengan diplomasi publik yaitu sebagai usaha pemerintah dalam membangun citra negara dengan melalui media dengan tujuan menyentuh langsung masyarakat di negara lain melalui kontak budaya.

Joseph S. Nye Jr (2004: 107-109) melengkapi konsep diplomasi publik dengan menyebutkan adanya tiga dimensi dalam diplomasi publik. Dimensi pertama adalah membangun komunikasi secara rutin, yang menjelaskan konteks dari kebijakan domestik maupun luar negeri suatu negara. Dimensi kedua adalah membangun sebuah komunikasi strategis, dimana suatu tema khusus terus menerus dipromosikan negara kepada publik. Dimensi terakhir adalah membangun hubungan jangka panjang dengan individu-individu penting lewat program-program seperti beasiswa, pertukaran pelajar atau tenaga ahli, pelatihan, seminar dan sebagainya.

b. Kepentingan Nasional

Diplomasi publik Jepang di Indonesia tentunya tidak tanpa alasan, terdapat tujuan maupun hasil yang ingin dicapai Jepang melalui program *cultural exchange* ini. Tujuan maupun hasil yang diharapkan Jepang tentunya harus sesuai dengan kepentingan nasionalnya. Kepentingan nasional (*national interest*) pada dasarnya adalah segala sesuatu yang harus dicapai oleh sebuah negara dalam berinteraksi dengan negara lain untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang bersifat penting bagi negara bagi suatu negara atau dengan kata lain adalah tujuan Nasional. Tujuan nasional merupakan hal yang merefleksikan cita-cita dan harapan yang ingin dicapai oleh negara.

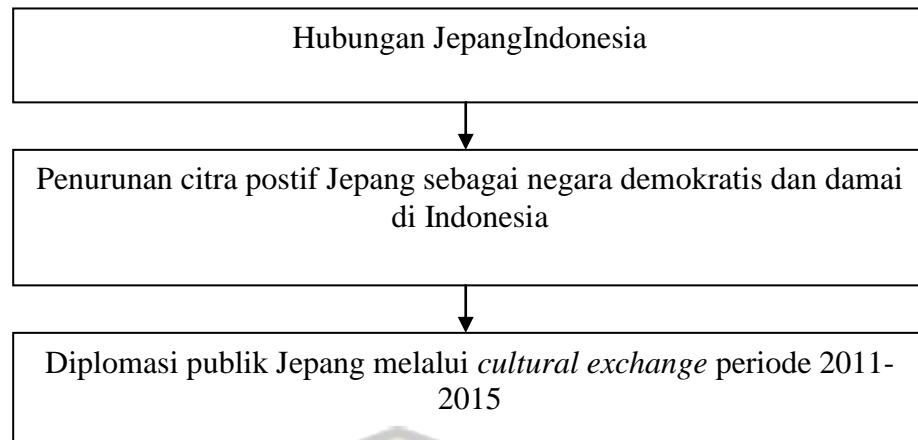
Konsep dari tujuan nasional merupakan hal yang paling penting dalam politik internasional. Vandana (1996:131) dalam buku *theory of*

international politics menyebutkan bahwa Morgenthau (1973) menjelaskan konsep kepentingan nasional sebagai “ *the political and the total culture context within which a nation formulates its foreign policy*”. Sedangkan Rostow menjelaskan bahwa kepentingan nasional merupakan konsep yang diterapkan negara dalam mencoba untuk mempengaruhi lingkungan dunia demi keuntungan negara.

Joseph Frankel (1970) membagi kepentingan nasional menjadi dua pendekatan yang spesifik yaitu secara objektif dan subjektif. Kategori pertama memuat pendekatan-pendekatan yang melihat kepentingan nasional sebagai sebuah konsep yang didefinisikan atau dibahas dengan bantuan beberapa kriteria objektif yang dapat di definisikan. Dengan kata lain, kepentingan nasional dianggap sebagai hal yang tetap, tidak dapat diubah dan berhubungan dengan kekuatan sedangkan kategori kedua percaya bahwa menerjemahkan kepentingan nasional sebagai suatu set referensi pluralistik subjektif yang terus berubah . (Joseph Frankel 1970:16-17, Vandana 1996: 131). Meski terdapat banyak pengertian mengenai konsep kepentingan nasional tidak didapat dipungkiri bahwa kepentingan nasional merupakan langkah pertama dalam menentukan kebijakan luar negeri dan dalam memahami politik internasional.

Dalam berinteraksi dengan negara lain di dalam sistem internasional, kepentingan nasional pasti dimiliki oleh setiap negara dimana kepentingan nasional adalah motivasi setiap negara dalam berinteraksi dengan negara lain. Sehingga, tugas dari decision maker akan penting agar kepentingan nasional bisa tercapai tanpa berselisih dengan negara lain. Hal tersebut diwujudkan dalam kebijakan luar negeri, kebijakan luar negeri dianggap sebagai cara untuk mencapai kepentingan nasional. Tujuan nasional tersebut tidak terlepas dari konsep peranan dan orientasi, dalam menjalankan hubungan internasional setiap negara melihat kemungkinan pencapaian tujuan tersebut melalui kerjasama (holsti 1987, hlm.1999)

I.7 Alur Pemikiran



I.8 Metodologi Penelitian

I.8.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan ilmu yang mempelajari tentang cara penelitian ilmu tentang alat-alat dalam suatu penelitian. oleh karena itu metode penelitian membahas tentang konsep teoritis berbagai metode, kelebihan dan kelemahan yang ada dalam suatu karya ilmiah. Kemudian dilanjutkan dengan pemilihan metode yang akan digunakan penelitian nantinya (Noeng muhadjir, 2000). Bermacam-macam metode penelitian yang dilihat dari landasan filsafat, data, analisisnya yang dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu metode penelitian kuantitatif, metode penelitian kualitatif, dan juga penelitian kombinasi.(sugiyono, 2011). Penelitian ini ditulis berdasarkan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif karena dalam penelitian ini berusaha menguraikan, menjelaskan serta menganalisis fakta-fakta, sifat serta hubungan suatu fenomena mengenai penurunan citra positif Jepang serta usaha diplomasi publik Jepang di Indonesia melalui pertukaran budaya

I.8.2 Sumber Data

a. Primer

Data Primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini didapatkan melalui Wawancara dengan pihak terkait dengan diplomasi publik Jepang yaitu *Japan Foundation* Jakarta selaku agen pelaksana pertukaran budaya di Indonesia serta Kedutaan Besar Jepang di Jakarta kemudian Situs-situs Resmi Japan Foundation, kedutaan besar Jepang untuk Indonesia juga Kementerian luar negeri Jepang (MoFA).

b. Sekunder

Data sekunder yang digunakan penulis didapat melalui buku-buku, jurnal ilmiah serta berita-berita yang terkait dengan masalah yang dibahas oleh penulis yaitu mengenai diplomasi publik Jepang di Indonesia.

I.8.3 Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskanya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Pada hakikatnya Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab. Melalui serangkaian aktivitas tersebut, data kualitatif yang biasanya berserakan dan bertumpuk-tumpuk bisa disederhanakan untuk akhirnya bisa dipahami dengan mudah. Pada bagian analisis data diuraikan proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis transkrip-transkrip wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain agar peneliti dapat menyajikan temuannya. (Sevilla 1993 dalam Tuwu, hlm. 72)

I.9 Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Merupakan bab yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian serta sistematikan penulisan.

BAB II : Penurunan Citra positif Jepang di Indonesia

Pada Bab II ini berisikan penjelesan mengenai dinamika hubungan Jepang dan Indonesia kemudian sebab-sebab penurunan citra positif Jepang di Indonesia.

BAB III : Diplomasi publik Jepang di Indonesia melalui Cultural Exchange

Bab III penulis akan menganalisa bentuk serta program-program *cultural exchange* Jepang yang dilakukan di Indonesia

BAB IV : Penutup

Bab Penutup berisikan kesimpulan dari analisa yang dilakukan pada Bab III serta menjelaskan inti dan rangkuman hasil penulisan skripsi ini.

